



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI, Jum'at, 26 April 2024



RINGKASAN BERITA HARI INI

Pemkab Sidoarjo Semangat Gelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-XXVIII

KOTA - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melaksanakan upacara peringatan Hari Otonomi Daerah yang ke XXVIII tahun 2024, di Alun-alun Sidoarjo, Kamis (25/4). Tema pada peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII kali ini adalah Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan Yang Sehat. Bertindak sebagai inspektur upacara dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Ferry Abridawati. Komandan Upacara Achmad Farkhan Jazuli dan dihadiri sejumlah pasukan upacara yang terdiri dari 1 Unit Korak Perakab Sidoarjo, 1 Pleton Kodim 0616 Sidoarjo, 1 Pleton Polresta Sidoarjo, 1 Pleton Pasukan Pamong Praja Sidoarjo, 1 Pleton Dinas Perhubungan Sidoarjo, 4 Pleton ASN Kabupaten Sidoarjo, 4 Pleton Kades/Kakel, 1 Pleton Linmas, 1 Pleton Purna Pasakbraka dan 3 Pleton Mahasiswa/Pesajar.



SELAMAT: Pemberian penghargaan dari Direktorat Jenderal Perencanaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur kepada desa prospektif good governance pengelolaan keuangan desa.

Menilik sejarah, tonggak pelaksanaan otonomi daerah diawali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995. Pemerintah pusat saat itu menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada 26 Daerah Tingkat II percontohan. Sehingga muncul Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1996 yang menetapkan tanggal 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah.

Pada kesempatan tersebut, Inspektur Upacara Ferry Abridawati menyampaikan dengan lantang dan tegas amanat Menteri Da-



KHIDMAT: Sekda Sidoarjo Ferry Abridawati memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah yang ke-XXVIII di Alun-alun.

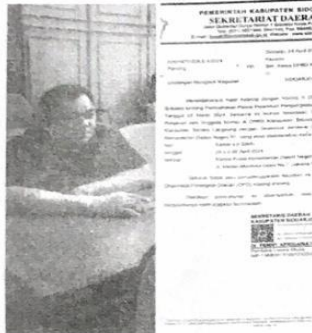
lam Negeri, Tito Karnavian. Tema Hari Otonomi Daerah ke XXVIII ini dipilih untuk memperkokoh komitmen, tanggung jawab dan kesadaran seluruh jajaran Pemerintah Daerah. Bahkan mereka memiliki amanah serta tugas untuk membangun keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat lokal.

"Serta mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan untuk mencipta-

kan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang," katanya.

Di akhir upacara, dilaksanakan dengan pengantrean penghargaan oleh Direktorat Jenderal Perencanaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur kepada Desa prospektif good governance pengelolaan keuangan desa di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Tanggapan JCW



Surat undangan Sekda Sidoarjo.

Ada Indikasi Kepentingan

SIDOARJO - Viral surat undangan Sekda Sidoarjo Ferry Abridawati yang beredar di grup WhatsApp dan pesan WhatsApp Kamis (24/4/24). Surat Undangan mengikuti kegiatan, yang dikeluarkan Sekdakab Sidoarjo Dr. Ferry Abridawati ditujukan kepada ketua DPRD Sidoarjo tertanggal 24 April 2024, begini bunyi surat undangan tersebut.

"Menindaklanjuti hasil hearing dengan Komisi A DPRD Sidoarjo tentang pembahasan pasca pelantikan, pengangkatan dalam jabatan tanggal 22 Maret 2024, bersama ini kami mohon kesediaan saudara beserta Pimpinan dan Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo, dalam rangka konsultasi secara langsung dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI. Kamis (24/4) 2024

Rajin Diversifikasi agar Produk Ecoprint Tetap Bertahan

SIDOARJO - Riski Fakhrunnisa sadar, saat ini kian banyak pelaku yang terjun di dunia ecoprint atau mencetak motif di kain dengan menggunakan daun, bunga, serta bahan alami lainnya. Karena itu, perempuan yang tinggal di Candi tersebut rajin membuat diversifikasi produk. Yang tadinya hanya menghasilkan syal dan lembaran kain, kini dia memproduksi mafa, tas, kerudung, topi, dompet, sandal, sepatu, hingga gantungan kunci.

Jalani Rawat Jalan, KPK Jadwal Pemanggilan Ulang Bupati Gus Muhdlor pada Jumat Mendatang

Ditetapkan Tersangka Korupsi, Terancam Dinon-aktifkan

SURABAYA, Memerandum Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif di lingkungan Badan Pertanahan Negeri (BPN) Sidoarjo.



Berita Minggu ke-12

Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sesuai perintah Apel peringatan Hari Otonomi Daerah (Hoda) di Balai Kota Surabaya pada Kamis (25/4). Tito menegaskan dalam amanat bahwa kesehatan daerah ditetapkan sebagai tersangka.

Tangani 39 Ruas Jalan Rusak, Sebagian Besar Dimulai Mei



RUSAK LAGI: Kendaraan melintasi jalan berlubang yang tertutupi genangan di Pondok Jati kemarin.

SIDOARJO - Pemkab Sidoarjo tahun ini memperbaiki 39 ruas jalan di Kota Delta secara kontraktual. Mayoritas dipapir Mei. Di tengah program tersebut, masih banyak jalan yang ditemukan dalam kondisi rusak.

Salah satunya, kerusakan di Jalan Pondok Jati. Tepatnya, di sisi utara Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo.

Hujan beberapa hari ini membuat kondisi jalan di sana semakin rusak. Muncul lubang jalan dan

ditakutkan. Pada Mei mendatang, ada 29 ruas yang dikerjakan. Di antaranya, ruas Magersari-Pagerwojo, Tebel-Ganting, Punggul-Gemurung, Prasing-Dukuh Tengah, ruas Sidomoyo, dan Lerak-Gamping-Juwangi.



Diperoleh info lanjutan, bahwa kondisi yang bersangkutan sudah dapat dilakukan tindakan rawat jalan. Kami jadwal pemanggilan ulang pada Jumat (3/5).

Mi Fitri Kabup. Pemberantasan KPK

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Gus Ali Dikabarkan Sakit

KPK telah menetapkan Gus Muhdlor sebagai tersangka atas dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif di lingkungan BPN Sidoarjo.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Harga Beras Masih di Atas HET, Rutin Operasi Pasar

SIDOARJO - Sejak Rabu (24/4) pemerintah pusat memperpanjang relaksasi harga eceran tertinggi (HET) beras premium dari Rp 13.900 menjadi Rp 14.900 per kilogram. Di Sidoarjo, harga beras premium masih di atas HET.



MASIH TINGGI: Pegawai menata beras premium di Pasar Larangan kemarin.

Beras premium di Sidoarjo rata-rata masih Rp 15.500 per kilogram, sedangkan beras medium Rp 14.500 per kilogram. Di tiap pasar besar, harganya berbeda, tapi tidak beda jauh. Meskipun masih di atas HET, stok maupun harga beras relatif stabil, bahkan cenderung turun.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sidoarjo Widyantoro Basuki mengatakan, HET tersebut berlaku nasional, termasuk di Sidoarjo. Tujuannya, menjaga stabilitas pasokan beras. Pria yang akrab



RSUD Sidoarjo Barat

Humas RSUD Sidoarjo Barat Tanggapi Kasus Davi

SIDOARJO - Setelah viral kasus Davi Anggun Vindayanti - calon pegawai negeri sipil (CPNS) - yang katanya diberhentikan tanpa kesalahan, kini pihak RSUD Sidoarjo Barat menanggapi. Berita ini mengungkap sejumlah orang, termasuk jajaran manajemen RSUD Sidoarjo Barat.

Pengacara Muhammad Sholeh alias Cak Sholeh, menyebut kasus Davi ini sangat miris. "Mas Bro, Mbak Bro. Ini ada kasus miris. Orang diberhentikan tanpa kesalahan apa pun. Di samping saya ini, adalah Mbak Davi Anggun Vindayanti, tinggal di Sepanjang, Sidoarjo," tegas Cak Sholeh.

Tanggal 28 Maret 2022, katanya, dia diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Ceritanya, melamar. Ada pembukaan lowongan untuk Rumah Sakit Daerah Sukodono, Sidoarjo. "Padahal, ini (RSUD Sukodono), juga tidak ada. Akhirnya ikut seleksi dan lolos. Pengusaha juga di RSUD Sukodono. Padahal RSUD di sana tidak ada. Kabarnya ini diajak sekitar 60 orang," jelas Cak Sholeh.

disapa Wiwid itu mengatakan, di Sidoarjo pasokan beras aman. "Apalagi, gudang Bulog juga ada di Sidoarjo," ujarnya. Namun, karena masih di atas HET, pihaknya gencar melakukan operasi pasar sebagai upaya stabilisasi harga. Termasuk pemantauan rutin harga dan stok beras di pasaran. "Setelah Lebaran ini, kami juga sudah melakukan operasi pasar. Ke depan, operasi pasar ini terus kami jadwalkan," katanya. (uzi/c7/any)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Penjaringan Calon Bupati-Wakil Bupati Sidoarjo Dimulai

Dua Partai Buka Pendaftaran

SIDOARJO - Partai-partai di Kota Delta menjaring calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) untuk Pilkada 2024 pada November mendatang. PDI Perjuangan dan PKB mulai membuka pendaftaran calon. Ketua DPC PDIP Sidoarjo Sumi Harsono mengatakan, pihaknya membuka pendaftaran cabup dan cawabup sejak 21 April lalu. "Kami

buka tepat di Hari Kartini. *Tagline* kami 'Sidoarjo Memanggil Pemimpin'. Ini jadi dorongan bagi siapa pun yang ingin maju dalam pilbup Sidoarjo melalui PDI Perjuangan," jelasnya.

Harapannya, putra-putri terbaik Sidoarjo yang punya integritas dan komitmen memajukan Sidoarjo bisa mendaftar. "Baik pengusaha, birokrat, tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun generasi muda. Kami beri ruang pengabdian bagi mereka," katanya. Hingga kemarin,

belum ada yang mendaftar.

Selain membuka pendaftaran, Sumi mengaku sudah berkomunikasi dengan partai lain. Sebab, PDIP harus berkoalisi untuk mencalonkan bupati. Berdasar UU Pilkada No 10 Tahun 2016, partai yang mengusung cabup dan cawabup untuk berkontestasi pada pilkada harus memiliki 10 kursi di DPRD Sidoarjo atau 20 persen dari jumlah 50 kursi. Sedangkan saat ini PDIP di Sidoarjo memiliki 9 kursi. "Kami berkomunikasi terus dengan partai lain,"

Kami buka tepat di Hari Kartini. *Tagline* kami 'Sidoarjo Memanggil Pemimpin'. Ini jadi dorongan bagi siapa pun yang ingin maju dalam pilbup Sidoarjo melalui PDI Perjuangan."

SUMI HARSONO

Ketua DPC PDIP Sidoarjo

ujarnya. Beda dengan PDIP, kursi PKB di Sidoarjo sudah 15.

Mereka bisa mengusung calon tanpa koalisi. Sekretaris DPC PKB Sidoarjo Abdillah Nasih mengungkapkan, meskipun PKB bisa menjadi partai pengusung tunggal, pihaknya masih membuka pintu untuk berkoalisi dengan partai lain. "Dengan 15 kursi, PKB bisa jadi pengusung tunggal. Kami tetap membuka diri untuk berkoalisi dengan partai lain meskipun bisa secara tunggal," jelas Nasih.

Sama dengan PDIP, PKB Sidoarjo juga mulai mem-

buka pendaftaran calon bupati dan wakil bupati secara *online* ke DPP PKB.

Pendaftaran *offline* ke kantor PKB Sidoarjo baru dimulai Minggu (28/4). Pendaftaran *offline* dibuka sampai 11 Mei mendatang. "Yang pendaftaran *online* di DPP bisa sampai 6 Agustus," jelasnya. Untuk pendaftaran *online*, saat ini sudah ada dua orang. Pertama, M. Shofi yang mendaftar sebagai cabup. Shofi adalah sekretaris umum Pemuda Pancasila Sidoarjo. Kedua, M. Nurul Anwar yang

mendaftar sebagai cawabup. Dia masih mahasiswa.

Nasih menyebutkan, sangat mungkin pendaftar terus bertambah. Sebab, siapa pun boleh mendaftar. Setelah tahapan pendaftaran, nanti pada 12-16 Mei ada verifikasi. Setelah itu, uji kelayakan dan kepatutan langsung dilakukan di DPP PKB. Dari seluruh pendaftar, nantinya DPP PKB yang memberikan rekomendasi pasangan calon yang akan bersaing di pilbup Sidoarjo. **(uzi/c7/any)**

Jawa Pos



DITE SURENDRA/JAWA POS

RUSAK LAGI: Kendaraan melintasi jalan berlubang yang tertutupi genangan di Pondok Jati kemarin.

Tangani 39 Ruas Jalan Rusak, Sebagian Besar Dimulai Mei

SIDOARJO – Pemkab Sidoarjo tahun ini memperbaiki 39 ruas jalan di Kota Delta secara kontraktual. Mayoritas digarap Mei. Di tengah program tersebut, masih banyak jalan yang ditemukan dalam kondisi rusak.

Salah satunya, kerusakan di Jalan Pondok Jati. Tepatnya, di sisi utara Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo. Hujan beberapa hari ini membuat kondisi jalan di sana semakin rusak. Muncul lubang jalan dan genangan air.

Ruas tersebut tahun lalu diperbaiki dengan diaspal ulang. Namun, tidak seluruh ruas. Yang diaspal hanya sisi utara karena

kondisi jalan di sisi selatan masih bagus. Namun, kini jalan yang sisi selatan mulai rusak. Imbas hujan deras dan volume kendaraan yang tinggi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo Dwi Eko Saptono mengatakan, jalan-jalan di Kota Delta diperbaiki secara bertahap. Tahun ini ada 39 ruas yang diperbaiki lewat pemeliharaan jalan secara kontraktual. Jalan tersebut diperbaiki dengan diaspal ulang, bukan dibeton. "Pengerjaan mulai berlangsung, Mei nanti paling banyak," jelasnya.

Sejak Maret lalu, perbaikan jalan

dilakukan. Pada Mei mendatang, ada 29 ruas yang dikerjakan. Di antaranya, ruas Magersari-Pagerwojo, Tebel-Ganting, Punggul-Gemurung, Prasung-Dukuh Tengah, ruas Sidomojo, dan Jeruk Gamping-Junwangi.

Dwi mengatakan, beberapa jalan yang masuk pemeliharaan tersebut akan dikerjakan satgas penanganan jalan rusak. Termasuk di Jalan Pondok Jati dan lainnya. "Bertahap diperbaiki, di Pondok Jati diperbaiki satgas jalan. Besok (hari ini, Red) diidentifikasi kerusakannya," ujarnya. Prinsipnya, tidak membahayakan pengguna jalan. (uzi/c7/any)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Harga Beras Masih di Atas HET, Rutin Operasi Pasar

SIDOARJO - Sejak Rabu (24/4) pemerintah pusat memperpanjang relaksasi harga eceran tertinggi (HET) beras premium dari Rp 13.900 menjadi Rp 14.900 per kilogram. Di Sidoarjo, harga beras premium masih di atas HET.

Beras premium di Sidoarjo rata-rata masih Rp 15.500 per kilogram, sedangkan beras medium Rp 14.500 per kilogram. Di tiap pasar besar, harganya berbeda, tapi tidak beda jauh. Meskipun masih di atas HET, stok maupun harga beras relatif stabil, bahkan cenderung turun.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sidoarjo Widyantoro Basuki mengatakan, HET tersebut berlaku nasional, termasuk di Sidoarjo. Tujuannya, menjaga stabilisasi pasokan beras. Pria yang akrab



DITE SURENDRA/JAWA POS

MASIH TINGGI: Pegawai menata beras premium di Pasar Larangan kemarin.

disapa Wiwid itu mengatakan, di Sidoarjo pasokan beras aman. "Apalagi, gudang Bulog juga ada di Sidoarjo," ujarnya.

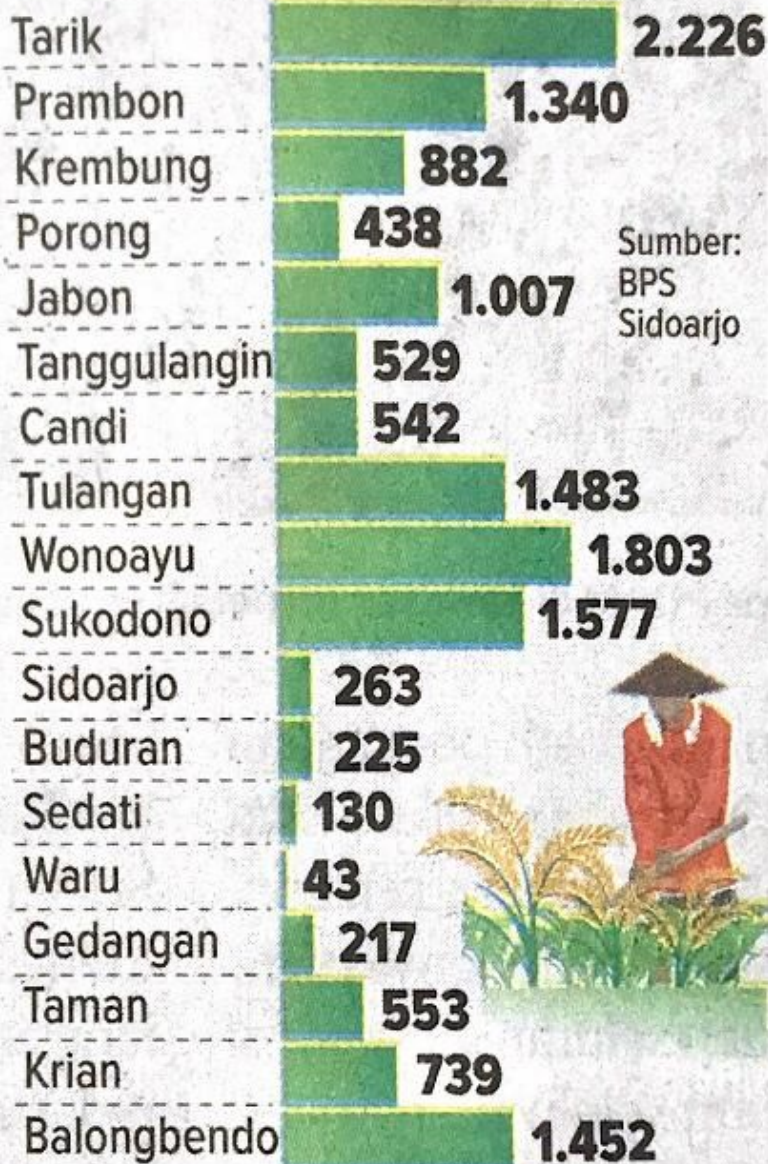
Namun, karena masih di atas HET, pihaknya gencar melakukan operasi pasar sebagai upaya

stabilisasi harga. Termasuk pemantauan rutin harga dan stok beras di pasaran. "Setelah Lebaran ini, kami juga sudah melakukan operasi pasar. Ke depan, operasi pasar ini terus kami jadwalkan," katanya. **(uzi/c7/any)**

Jawa Pos

DALAM ANGKA

**JUMLAH
USAHA
PERTANIAN
PERORANGAN
GUREM
TANAMAN
PANGAN
DI TIAP
KECAMATAN
DI SIDOARJO**



GRAFIS: BAGUS/JAWA POS

JUMLAH usaha pertanian perorangan gurem (usaha pertanian dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektare) untuk tanaman pangan di Kabupaten Sidoarjo mencapai 15.449. Paling banyak ada di Kecamatan Tarik. (uzi/c7/any)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Rajin Diversifikasi agar Produk Ecoprint Tetap Bertahan

SIDOARJO - Riski Fakhrunnisa sadar, saat ini kian banyak pelaku yang terjun di dunia *ecoprint* atau mencetak motif di kain dengan menggunakan daun, bunga, serta bahan alami lainnya. Karena itu, perempuan yang tinggal di Candi tersebut rajin membuat diversifikasi produk. Yang tadinya hanya menghasilkan syal dan lembaran kain, kini dia memproduksi mafela, tas, kerudung, topi, dompet, sandal, sepatu, hingga gantungan kunci.

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

"Pokoknya, jangan sampai ada bahan

" kata Riski Setelah

yang terbuang percuma, kata Riski. Setelah mengawali usahanya pada 2019, dia mendapat banyak pelatihan. Termasuk pelatihan dari BRI. Karena itu, jika di awal dia hanya "bermain" dengan kain, kini ibu tiga anak itu bisa mengeksplorasi bahan lain sebagai dasar *ecoprint*. Misalnya, kulit sintetis, kulit sapi, dan kulit domba.

Menurut Riski, justru dalam membuat *ecoprint* dengan bahan kulit itu, tingkat kesulitannya tidak setinggi di kain. "Sebab, ada protein di kulit sehingga warna lebih menempel," ucap Riski. Dalam sebulan, Riski bisa tiga kali memproduksi kain *ecoprint*. Sekali produksi, dia bisa membuat 10-15 lembar kain.

Dalam sekali produksi, Riski selalu membuat seri atau tema. "Misalnya, seri merah daun jati, ya semua produksi kali ini warnanya merah. Produksi berikutnya baru ganti warna," ujarnya. Tema per produksi mempermudah menentukan bahan apa saja yang dibutuhkan.

Tergabung dalam Rumah BUMN BRI, Riski merasakan banyak manfaat yang didapatkannya. Terutama yang berkaitan dengan pemasaran digital. "Produk saya paling banyak laku via *Instagram* dan *Google Business*," ujar Riski. Dia juga berharap bisa mengembangkan savan

lebih lebar dengan suntikan dana kredit usaha rakyat (KUR) dari BRI.

Sementara itu, Pemimpin Cabang BRI Branch Office Sidoarjo Sudono mengatakan, produk kerajinan UMKM dari Sidoarjo memiliki kekhasan dan punya segmen tersendiri. Dengan pemahaman yang memadai soal pemasaran digital, produk UMKM Sidoarjo bisa terdistribusi makin luas. (dra/c7/any)

Jawa Pos

Pemkab Sidoarjo Semangat Gelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-XXVIII

KOTA-Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melaksanakan upacara peringatan Hari Otonomi Daerah yang ke XXVIII tahun 2024, di Alun-alun Sidoarjo, Kamis(25/4). Tema pada peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII kali ini adalah Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan Yang Sehat. Bertindak sebagai Inspektur upacara dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati, Komandan Upacara Achmad Farkan Jazuli dan dihadiri sejumlah pasukan upacara yang terdiri dari 1 Unit Korsik Pemkab Sidoarjo, 1 Pleton Kodim 0816 Sidoarjo, 1 Pleton Polresta Sidoarjo, 1 Pleton Pasukan Pamong Praja Sidoarjo, 1 Pleton Dinas Perhubungan Sidoarjo, 4 Pleton ASN Kabupaten Sidoarjo, 4 Pleton Kades/kakel, 1 Pleton Linmas, 1 Pleton Purna Paskibraka dan 3 Pleton Mahasiswa/Pelajar.

Menilik sejarah, tonggak pelaksanaan otonomi daerah diawali melalui Pera-



SELAMAT: Pemberian penghargaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan kantor wilayah Provinsi Jawa Timur kepada desa prospektif good governance pengelolaan keuangan desa.

turan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995. Pemerintah pusat saat itu menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada 26 Daerah Tingkat II percontohan. Sehingga muncul Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1996 yang menetapkan tanggal 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah.

Pada kesempatan tersebut, Inspektur Upacara Fenny Apridawati menyampaikannya dengan lantang dan tegas amanat Menteri Da-

lam Negeri, Tito Karnavian. Tema Hari Otonomi Daerah ke XXVIII ini dipilih untuk memperkokoh komitmen, tanggung jawab dan kesadaran seluruh jajaran Pemerintah Daerah. Bahwa mereka memiliki amanah serta tugas untuk membangun keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat lokal.

"Serta mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan untuk mencipta-



KHIDMAT: Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah yang ke-XXVIII di Alun-alun.

kan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang," katanya.

Di akhir upacara, dilanjutkan dengan penganugerahan penghargaan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan kantor wilayah

Provinsi Jawa Timur kepada peringkat 1,2 dan 3 sebagai Desa prospektif good governance pengelolaan keuangan desa di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Penghargaan secara simbolis diberikan oleh Sekda

Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati kepada kepala desa para pemenang. Untuk peringkat 1 Desa Jemundo, Kecamatan Taman, peringkat 2 Desa Keboan Anom, Kecamatan Gedangan dan peringkat 3 Desa Tambak-

oso, Kecamatan Waru. Meski dibawah gujuran gerimis hujan, namun tidak mempengaruhi semangat para peserta upacara untuk melanjutkan dan menyelesaikan upacara hingga akhir. (nis/vga)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



TERBUKA: Ketua Desk DPC PKB Sidoarjo Abdullah Nasih (tengah) saat membuka pendaftaran cabup-cawabup.

Baru Dibuka, Sudah Ada Dua Orang Daftar Cabup-Cawabup PKB

KOTA-DPC PKB Sidoarjo buka pendaftaran bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada serentak 2024. Ketua Desk DPC PKB Sidoarjo Abdullah Nasih mengatakan

jika pembukaan pendaftaran tersebut dilakukan guna menjaring calon kepala daerah. Pendaftaran nantinya akan terbuka selama dua minggu. "Pendaftaran Calon Kepala

Daerah (Cakapda) dari DPP PKB secara offline kami mulai Minggu, 28 April hingga 11 Mei 2024," ucapnya, Kamis, 25 April 2024. Nasih menjelaskan, jika DPP

PKB juga sudah membuka pendaftaran secara online pada 20 April. Nantinya pendaftaran akan ditutup 26 Agustus. "Kami mempunyai dua jalur ya,

● Ke Halaman 10



Baru Dibuka...

online langsung ke DPP tetapi juga di DPC dibuka kesempatan secara offline," ujarnya.

Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo tersebut mengungkapkan, jika saat ini

telah ada dua bakal calon yang mendaftar melalui pendaftaran online DPP PKB. Satu mendaftar sebagai Bupati dan satunya lagi sebagai Wakil Bupati.

"Ada dua yang sudah mendaftar lewat online sistem Cakada di DPP PKB, Calon Bupati itu atas nama M Sofi, dia

sekretaris HIPMI dan Pemuda Pancasila Sidoarjo. Yang Wakil Bupati atas nama M Nurul Anwar, backgroundnya mahasiswa, berusia 22 tahun," ungkapnya.

Nasih menegaskan jika PKB merupakan partai yang terbuka bagi masyarakat. Sehingga bagi siapa saja

yang ingin mendaftar dia persilahkan.

"Ini membuktikan saat ini PKB tidak lagi menjadi partai yang eksklusif dan diminati oleh kelompok milenial," terangnya.

Dia menyebut, pendaftaran sifatnya terbuka, bebas, menerima dari segala

masyarakat. Baik dari partai yang lain, pengusaha, kelompok ormas, dari yang berusia muda dipersilahkan. Meski begitu, keputusan keputusan akhir ada di tangan DPP PKB. "PKB berprinsip pada asas demokrasi dan taat hukum," tutupnya. (sai/nis)



Kelurahan Porong Gelar FKP, Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

SIDOARJO-Kelurahan Porong menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) tahun 2024 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayahnya. Kegiatan yang berlangsung di pendopo kelurahan itu dihadiri oleh Lurah Porong Jumilah S.H., para perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat, rabu 24 April 2024.

Dalam sambutannya, Lurah Jumilah menjelaskan bahwa FKP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan.

Dia menjelaskan, tujuan FKP adalah untuk mendapatkan masukan dari masyarakat tentang kualitas pelayanan publik di Kelurahan Porong. "Masukan



KOORDINASI: Lurah Porong Jumilah (kerudung kuning) saat memberikan sambutan dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP).

ini akan digunakan untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik," ujarnya.

Lebih lanjut, Lurah Jumilah menyampaikan bahwa Kelurahan Porong telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Meluncurkan inovasi pelayanan malam hari dan Minggu

pagi, dan meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi terkait. "Kami berharap dengan FKP ini, hubungan antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat semakin erat dan terjalin komunikasi yang baik," kata Lurah Jumilah.

Pihaknya mengaku siap untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan sebaik-baiknya. (nis/vga)

Kelurahan Porong Gelar FKP, Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

SIDOARJO-Kelurahan Porong menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) tahun 2024 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayahnya. Kegiatan yang berlangsung di pendopo kelurahan itu dihadiri oleh Lurah Porong Jumilah S.H., para perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat, rabu 24 April 2024.

Dalam sambutannya, Lurah Jumilah menjelaskan bahwa FKP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan.

Dia menjelaskan, tujuan FKP adalah untuk mendapatkan masukan dari masyarakat tentang kualitas pelayanan publik di Kelurahan Porong. "Masukan



KOORDINASI: Lurah Porong Jumilah (kerudung kuning) saat memberikan sambutan dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP).

ini akan digunakan untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik," ujarnya.

Lebih lanjut, Lurah Jumilah menyampaikan bahwa Kelurahan Porong telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Meluncurkan inovasi pelayanan malam hari dan Minggu

pagi, dan meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi terkait. "Kami berharap dengan FKP ini, hubungan antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat semakin erat dan terjalin komunikasi yang baik," kata Lurah Jumilah.

Pihaknya mengaku siap untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan sebaik-baiknya. (nis/vga)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

BMKG : Cuaca Ekstrem hingga 28 April

KOTA-Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo mengeluarkan imbauan penting kepada masyarakat. Tidak hanya di Sidoarjo, namun di beberapa wilayah di Jawa Timur.

Kepala BMKG Kelas I Juanda Taufiq Hermawan mengatakan, masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang diprediksi akan melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur. "Diperkirakan mulai 22 hingga 28 April 2024,"

katanya.

Dia menjelaskan, gangguan gelombang Ekuatorial Rossby dan MJO (Madden-Julian Oscillation) disebut-sebut menjadi pemicu utama terbentuknya awan-awan konvektif yang massif. Akibatnya, berpotensi menyebabkan cuaca ekstrem di wilayah Jawa Timur.

Beberapa wilayah yang mungkin terdampak langsung oleh cuaca ekstrem ini antara lain Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi, Kota Batu, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bondowoso,

Kabupaten Gresik, Kabupaten Jombang, Kota Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan.

Taufiq menyebut, ada beragam dampak yang dikhawatirkan akibat cuaca ekstrem. Seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, jalan licin, pohon tumbang, dan gangguan jaringan komunikasi. (nis/vga)



MENDUNG: Cuaca di Sidoarjo setelah diguyur hujan pada Kamis (25/4) siang.



Warga Korban Lumpur Lapindo Syukuran Menerima Sertifikat Rumah

Sidoarjo, Bhirawa

Setelah menunggu sabar selama 13 tahun, warga perumahan Reno Jowo yang ada Desa Kedung solo, Kecamatan Porong, pada Bulan November 2023 lalu, akhirnya menerima sertifikat tanah mereka.

Sebagai ungkapan rasa syukur, sekitar 400 warga perumahan yang telah menerima sertifikat rumah, Kamis (25/4) sore kemarin, membuat 100 tumpeng untuk dimakan bersama-sama.

Perwakilan warga Perumahan Renojoyo, Yudho Wintoko, menyampaikan acara tersebut juga sekaligus dimanfaatkan untuk halal bihalal hari raya Idul Fitri dan mengaktifkan kembali tradisi sedekah bumi.

"Sertifikat yang kami terima ini tidak ada biayanya alias gratis dari Pemerintah," katanya disela-sela acara syukuran yang digelar di jalan utama perumahan tersebut.

Wintoko mengakui warga perumahan Renojoyo itu, semuanya berasal dari Desa Renokenongo Kecamatan Porong, yang pada tahun 2006 lalu, terendam lumpur Lapindo yang menyebur pada 29 Mei 2006 lalu.

"Kami bersyukur masih bisa berkumpul kembali dengan para tetangga kami, meski kami sempat harus pindah dari Desa Renokenongo yang terendam lumpur Lapindo," katanya.

Menurut dirinya, masih ada sekitar 200 an warga Perumahan Renojoyo yang masih belum menerima sertifikat tanah. Dirinya berharap mereka juga akan bisa segera menerima sertifikat tanah seperti warga lainnya.

Dinnya berterima kasih atas partisipasi warga Perumahan Renojoyo sehingga acara tersebut bisa terlaksana dengan lancar. Dalam acara tersebut, turut mengundang Camat Porong, Khorul Anam SSTP, dan anggota Forkopimka Porong. (kus.gat)



Warga Perumahan Renojoyo syukuran tumpeng karena sertifikat tanah sudah selesai dan berhasil bihalal.

ali kuyanto/bhirawa

HARIAN
Bhirawa
Buku Sajat Bhiru Sajat



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Gus Ali Dikabarkan Sakit

KPK telah menetapkan Gus Muhdlor sebagai tersangka atas dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif di lingkungan BPPD Sidoarjo.

Di tengah situasi tersebut, dilaporkan bahwa kesehatan ayah kandung Gus Muhdlor, KH Agoes

Ali Masyhuri atau Gus Ali, menurun. Gus Ali dikabarkan sakit dan dirawat di rumah kediaman di Pondok Pesantren (Ponpes) Progresif Bumi Sholawat, tepatnya di Desa Kenongo, Kecamatan Tulangan.

Pantauan Memorandum di
■ **Bersambung ke halaman 2**

MEMORANDUM

BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

Gus Ali Dikabarkan Sakit

Ponpes Progresif Bumi Sholawat yang setara dengan SMP dan SMA itu kondisinya seperti biasa. Situasi tampak tenang dan nyaman. Para santri menjalankan kegiatan seperti biasanya. Tampak sore itu mereka bersiap hendak menjalankan salat Magrib.

Sementara kabar Gus Ali sakit itu dikatakan Ari selaku penjaga kediaman rumah Gus Ali yang berada

di kawasan Ponpes Progresif Bumi Sholawat. "Gus Ali ada di dalam, kondisinya lagi sakit," kata Ari ditemui *Memorandum* saat berusaha mengkonfirmasi keberadaan Gus Muhdlor.

Terkait keberadaan Gus Muhdlor, Ari mengaku bahwa yang bersangkutan tidak ada di dalam. "Kalau Gus Muhdlor tidak ada, karena ini khusus ponpes," tuturnya.

Hal senada juga dikatakan Ubet

Sambungan dari halaman 1

penjaga asrama laki laki di kompleks Ponpes Progresif Bumi Sholawat. Ia menegaskan bahwa Gus Muhdlor tidak ada di ponpes. "Kalau Gus Muhdlor tidak ada di ponpes Mas. Tidak ada urusannya dengan pondok," tandasnya.

Sementara pasca-ditetapkan tersangka keberadaan Gus Muhdlor belum diketahui. Sebelumnya dikabarkan Gus Muhdlor dirawat di RSUD Sidoarjo Barat. (alf/nov)

MEMORANDUM

BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

Jalani Rawat Jalan, KPK Jadwal Pemanggilan Ulang Bupati Gus Muhdlor pada Jumat Mendatang

Ditetapkan Tersangka Korupsi, Terancam Dinon-aktifkan

Surabaya, Memorandum

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo.

Akibat statusnya sebagai tersangka, Gus Muhdlor terancam dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Bupati Sidoarjo. Hal ini sesuai dengan aturan yang berlaku, di mana kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi harus dinonaktifkan. Hal itu dikatakan Menteri

Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sesuai memimpin Apel peringatan Hari Otonomi Daerah (Otodada) di Balai Kota Surabaya pada Kamis (25/4).

Tito menegaskan dalam aturannya jika kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka

■ Bersambung ke halaman 2



”

Diperoleh info lanjutan, bahwa kondisi yang bersangkutan sudah dapat dilakukan tindakan rawat jalan. Kami jadwal pemanggilan ulang pada Jumat (3/5).

Ali Fikri

Kabag Pemberitaan KPK



Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali



RSUD Sidoarjo Barat tempat Gus Muhdlor dirawat selama empat hari.

Kediaman Gus Ali di Ponpes Progresif Bumi Sholawat di Desa Kenongo, Kecamatan Tulangan.



MEMORANDUM

BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

Ditetapkan Tersangka Korupsi, Terancam Dinon-aktifkan

maka yang bersangkutan akan dinonaktifkan. "Semua ada aturannya. Kalau semua kepala daerah yang ditetapkan tersangka, otomatis akan dinonaktifkan dan yang menggantikan biasanya wakilnya sebagai Pit (pelaksana tugas)," kata Tito.

Ja juga menjelaskan secara prosedur, jika kepala daerah baru dijadikan saksi, maka dia tidak bisa dinonaktifkan. Sementara jika berstatus sudah tersangka baru bisa dinonaktifkan.

"Ini terkait prosedur, bukan kasusnya. Kalau seandainya sudah terdakwa lalu ada proses yang lain maka bisa dibentangkan sementara. Kalau statusnya permanen, baru pemberhentian permanen," tandasnya.

Sementara itu, KPK menjadwalkan pemanggilan ulang Gus Muhdlor pada Jumat (3/5) mendatang. Pemanggilan Gus Muhdlor itu dilakukan KPK untuk kedua kalinya setelah dirinya mangkir, pada (19/4), lalu.

KPK tak hanya diam di pascabsennya Gus Muhdlor dalam pemeriksaan sebagai tersangka pada Jumat lalu. Petugas antirasuah ini langsung turun gunung untuk memastikannya kondisi Gus Muhdlor yang absen karena sakit.

Buktinya, Selasa (23/4), tim penyidik KPK mengecek di RSUD Sidoarjo Barat. "Diperoleh info lanjutan, bahwa kondisi yang bersangkutan sudah dapat dilakukan tindakan rawat jalan," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Kamis (25/4).

Untuk itu, tambah Ali Fikri, tim penyidik telah menyiapkan penjadwalan pemanggilan ulang tersangka pada Jumat (3/5) bertempat di gedung Merah Putih KPK.

"Kami jadwal pemanggilan ulang pada Jumat (3/5)," ujarnya.

Tambah Ali Fikri, bahwa KPK tentu mengingatkan lagi agar yang bersangkutan kooperatif hadir. "Kami ingatkan agar bersangkutan kooperatif hadir," tegasnya.

Selain itu, KPK tetap tegas jika ditemukan adanya pihak-pihak yang sengaja menghalangi maupun merintangi proses penyidikan perkara ini maka dapat diterapkan pasal 21 UU Tipikor.

"Jika ditemukan pihak yang sengaja menghalangi atau merintangi penyidikan perkara ini maka diterapkan pasal 21 UU Tipikor," pungkas Ali Fikri. Informasi yang digali *Memoran-*

dum, Gus Muhdlor sempat dirawat selama 4 hari di Rumah Sakit (RS) Sidoarjo Barat. Dia menginap di ruang VVIP lantai 4 sejak Rabu (17/4). Kini, dikabarkan dia sudah menjalani rawat jalan.

"Sudah pulang dan rawat jalan. Kamarnya sekarang sudah kosong. Kalau sebelumnya memang benar dirawat di sini selama empat hari. Kurang tahu sakit apa," kata Wahyudin, Komandan Regu 1 RS Sidoarjo Barat ditemui *Memorandum*, Kamis (25/4).

Wahyudin menjelaskan, Muhdlor saat itu datang pada malam hari melakukan kontrol. Kemudian masuk kamar pada saat itu juga. Lalu selang 2 hari, Muhdlor baru keluar kamar. Dia terlihat sedang berada di kamit lantai 3. "Iya, beliau saat itu terlihat sedang makan ditemani keluarganya," kata Wahyudin.

Dijelaskan, kondisi saat Muhdlor menginap berlangsung kondusif. Tidak ada tanda-tanda aparat bersenjata cokelat yang menjaga. Wahyudin juga tak mengetahui kedatangan KPK ke rumah sakit.

Namun yang jelas, kata Wahyudin pada Jumat (26/4), akan ada demo di depan RS Sidoarjo Barat. Massa mem-

rupakan kelompok dari mahasiswa. Jumlahnya sebanyak 120 orang.

"Infonya yang masuk akan ada demo pada Jumat. Kurang tahu terkait apa, tapi sebelumnya rumah sakit kita tidak pernah didemo, mungkin ya terkait kasus yang menjerat Pak Bupati," tutup Wahyudin.

Sepereti diketahui, pada Jumat (19/4), Gus Muhdlor dipanggil KPK dalam kapasitasnya sebagai tersangka dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif di lingkungan BPPD Sidoarjo.

Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gus Muhdlor sebagai tersangka pada Jumat lalu. Namun Muhdlor tidak memenuhi panggilan dengan alasan sakit. Selain Muhdlor, KPK telah menetapkan dua

tersangka lain dalam kasus ini.

Mereka adalah Kepala BPPD Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono dan Kepala Sub Bagian Umum BPPD Kabupaten Sidoarjo Siska Wati. KPK mengungkapkan, di tahun 2023, diperoleh besaran pendapatan pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp 1,3 triliun.

Atas perolehan tersebut, maka ASN yang bertugas di BPPD akan mendapatkan dana insentif.

KPK menduga, Siska selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD sekaligus Bendahara secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari para ASN tersebut. Permintaan potongan dana insentif ini disampaikan secara lisan oleh Siska pada para ASN di beberapa kesempatan dan

adanya larangan untuk tidak membahas potongan dimaksud melalui alat komunikasi diantaranya melalui percakapan *WhatsApp* (WA).

KPK menyebut, Siska mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp 2,7 miliar. Pemotongan dan penerimaan dari dana insentif dimaksud di antaranya untuk kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo.

Diduga penyerahan uangnya dilakukan secara tunai yang dikoordinir oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di 3 bidang pajak daerah dan bagian sekretariat. Besaran potongan yaitu 10 persen hingga 30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima. (all/fer/bin/nov)

Sambungan dari halaman 1

MEMORANDUM

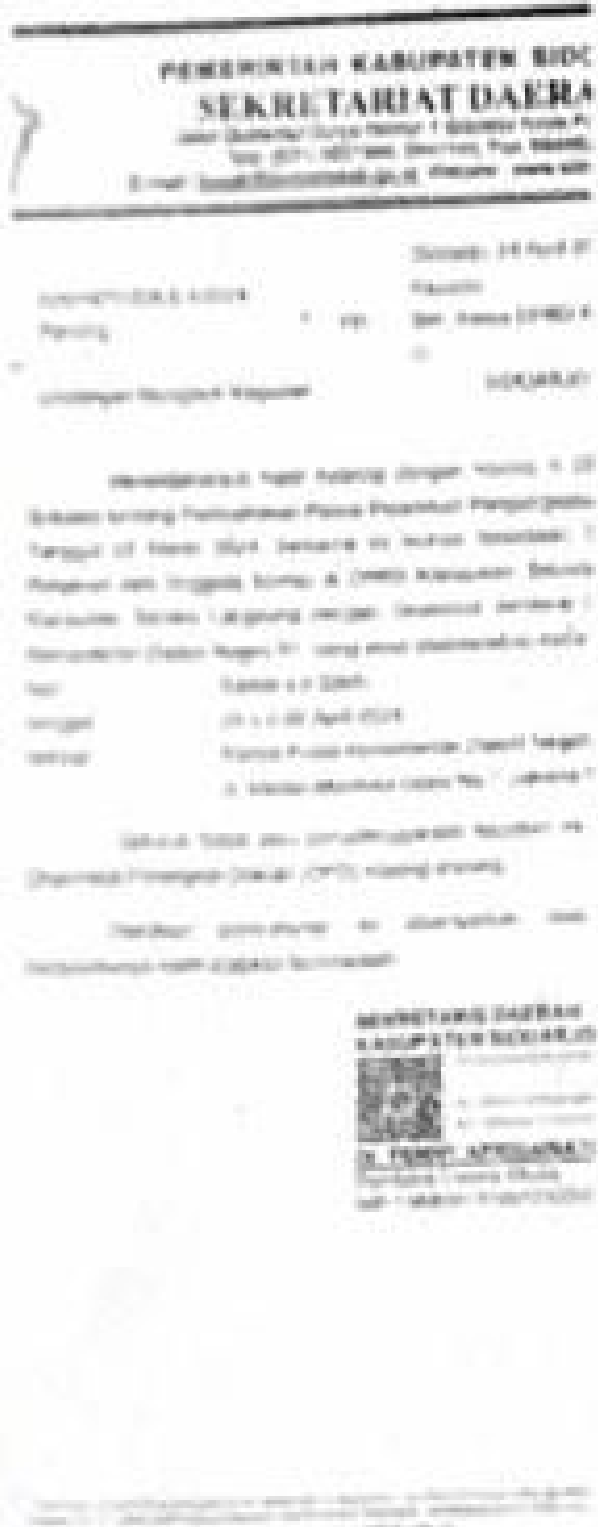
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Tanggapan JCW



LODTP/DARA

Sigit Imam Basuki dan surat undangan Sekda Sidoarjo.

Ada Indikasi Kepentingan

SIDOARJO - Viral surat undangan Sekda Sidoarjo, Fenny Apridawati yang beredar di group WhatsApp dan pesan WhatsApp Kamis (24/4/24). Surat Undangan mengikuti kegiatan, yang

dikeluarkan Sekdakab Sidoarjo Dr.Fenny Apridawati ditujukan kepada ketua DPRD Sidoarjo tertanggal 24 April 2024,begini bunyi surat undangan tersebut.

“Menindaklanjuti hasil hearing dengan Komisi A DPRD Sidoarjo tentang pembahasan pasca pelantikan, pengangkatan dalam jabatan tanggal 22 Maret 2024, bersama ini kami mohon kesediaan saudara beserta Pimpinan dan Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo, dalam rangka konsultasi secara langsung dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Kamis (24/4)24) sampai dengan Sabtu(26/4/24).

Tempat kantor pusat Kementerian Dalam Negeri RI.Seluruh biaya atas penyelenggaraan kegiatan ditanggung oleh Organisasi Perangkat Daerah(OPD) masing-masing,begitu bunyi surat undangan tersebut.

Sigit Imam Basuki , ST. Ketua umum Java Corruption Watch (JCW) menanggapi surat tersebut yang ditujukan tertanggal hari ini Kamis (24/4/24),yang jelas ,Fenomena yang terjadi di DPRD Sidoarjo setelah diadakan hearing antara Sekda baru dan jajarannya yang baru saja dilantik kemarin,hal ini menurut saya secara etika sudah tidak relevan, sebaiknya DPRD kembali ke tugas pokoknya saja yaitu sebagai fungsi kontrol pengawasan, bukan mengawal dan memperjuangkan produk cacat prosedur, cacat hukum.

“Sudah jelas pelantikan 495 ASN dibatalkan kenapa masih ikut mengawal ke Mendagri, dalam hal ini saya melihat, terkesan ada indikasi kepentingan tersendiri Ketua DPRD Sidoarjo dengan Sekda,"tegasnya kepada duta. co (24/4/24).

Masih kata Sigit,biarkan saja, biar Sekda berangkat ke Mendagri dengan membawa hasil Notulen hearing kemarin, Ketua DPRD lebih fokus saja ke program Danisung telah

REDAKSI FOKUS SAJA KE PROGRAM KERJA yang telah di agendakan sebelumnya, bukan mengurus program yang cacat prosedur, tidak etis," pungkas Sigit Imam Basuki. ● Loe

DUTA



RSUD Sidoarjo Barat

LOE/DUTA

Humas RSUD Sidoarjo Barat Tanggapi Kasus Davi

SIDOARJO - Setelah viral kasus Davi Anggun Vindayanti – calon pegawai negeri sipil (CPNS) – yang katanya diberhentikan tanpa kesalahan, kini pihak RSUD Sidoarjo Barat menanggapi. Berita ini mengusik sejumlah orang, termasuk jajaran manajemen RSUD Sidoarjo Barat.

Pengacara Muhammad Sholeh alias Cak Sholeh, menyebut kasus Davi ini sangat miris. "Mas Bro, Mbak Bro. Ini ada kasus miris. Orang diberhentikan tanpa kesalahan apapun. Di samping saya ini, adalah Mbak Davi Anggun Vindayanti, tinggal di Sepanjang, Sidoarjo," tegas Cak Sholeh.

Tanggal 28 Maret 2022, katanya, dia diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Ceritanya, melamar. Ada pembukaan lowongan untuk Rumah Sakit Daerah Sukodono, Sidoarjo. "Padahal, ini (RSUD Sukodono), juga tidak ada. Akhirnya ikut seleksi dan lolos. Penugasannya juga di RSUD Sukodono. Padahal RSUD di sana tidak ada. Kabarnya ini dialami sekitar 60

orang," jelas Cak Sholeh.

Nah, menanggapi hal itu Humas RSUD Sidoarjo Barat, angkat bicara. Cuma karena merasa bukan domainnya (langsung) untuk menjawab secara resmi, maka, bagian Humas itu hanya menjelaskan supaya berimbang. "Tolong jangan tulis nama saya," jelas perempuan tersebut.

Iya, bahwa saudari Davi Anggun Vindayanti, A,MD, telah melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat. "Bentuknya tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dan tidak dapat memberikan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan," demikian salah satu staf Humas RSUD Sibar itu kepada duta.co, Kamis, (25/4/24) di ruang kerjanya.

Menurutnya, sudah dilakukan pembinaan serta pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu. "Yang bersangkutan telah menerima surat keputusan Bupati Sidoarjo tentang pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri sebagai calon pegawai

negeri sipil a.n Davi Anggun Vindayanti, A,Md," tegasnya.

Di sisi lain, tegasnya, yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum terhadap keputusan Bupati Sidoarjo di point' 3 ,dengan melakukan upaya banding administrasi ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara .

"Dia telah menerima surat keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, tentang penguatan keputusan Bupati Sidoarjo tentang pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri sebagai calon pegawai negeri sipil a.n Davi Anggun Vindayanti, A,Md," terangnya.

Pesannya, terkait permasalahan ini, diharapkan masyarakat tidak menelan mentah-mentah segala sesuatu atau informasi secara sepihak. Sambil menunggu jawaban resmi, duta.co berharap ada jawaban yang seimbang, termasuk data-data indisiplinernya. Karena Davi menurut Cak Sholeh jatuh sakit akibat kecelakaan. ● Loe

DUTA



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Meski Diguyur Gerimis, Pemkab Tetap Gelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-XXVIII

Sidoarjo, Pojok Kiri

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melaksanakan upacara peringatan Hari Otonomi Daerah yang ke XXVIII tahun 2024, di Alun-alun Sidoarjo, Kamis(25/4). Tema pada peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII kali ini adalah Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan Yang Sehat.

Bertindak sebagai Inspektur upacara dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, Komandan Upacara Achmad Farkan Jazuli dan dihadiri sejumlah pasukan upacara yang terdiri dari 1 Unit Kor-sik Pemkab Sidoarjo, 1 Ple-ton Kodim 0816 Sidoarjo, 1 Ple-ton Polresta Sidoarjo, 1 Ple-ton Pasukan Pamong Praja



Sidoarjo, 1 Ple-ton Dinas Per-hubungan Sidoarjo, 4 Ple-ton ASN Kabupaten Sidoarjo, 4 Ple-ton Kades/kakel, 1 Ple-ton Linmas, 1 Ple-ton Purna Paskibraka dan 3 Ple-ton Ma-hasiswa/Pelajar.

Menilik sejarah, tonggak pelaksanaan otonomi daerah diawali melalui Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995. Pemerintah pusat saat itu menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada 26 Daerah Tingkat II per-contohan. Sehingga muncul Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1996 yang menetapkan tanggal 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah.

Pada kesempatan tersebut, Inspektur Upacara Fenny Apridawati menyampaikan dengan lantang dan tegas amanat Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Tema Hari Otonomi Daerah ke XXVIII ini dipilih untuk memperkuat komitmen, tanggung jawab dan kesadaran seluruh jajaran Pemerintah Daerah akan amanah serta tugas untuk membangun keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat lokal serta mem-promosikan model ekonomi yang ramah lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Di akhir upacara, dilan-jutkan dengan penganuger-aahan penghargaan oleh

Direktoral Jenderal Perben-daharaan kantor wilayah Provinsi Jawa Timur kepada peringkat 1,2 dan 3 sebagai Desa prospektif good gover-nance pengelolaan keuangan desa di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Penghargaan secara sim-bolis diberikan oleh Sekda Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati kepada kepala desa para pemenang. Untuk peringkat 1 Desa Jemundo, Kecamatan Taman, pering-kat 2 Desa Keboan Anom, Kecamatan Gedangan dan peringkat 3 Desa Tambako, Kecamatan Waru.

Meski dibawah guyuran gerimis hujan, namun tidak mempengaruhi semangat para peserta upacara untuk melanjutkan dan menyelesaikan upacara hingga akhir. **(Khol/Dy)**

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT



PENEGAKAN HUKUM POLITIK

Mendagri : Sesuai Aturan, Bupati Tersangka Akan Dinonaktifkan

Liputan Sidoarjo.com



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

SIDOARJO (liputansidoarjo.com)- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, dengan status tersangka yang disandang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor saat ini, bisa berimbas pada dinonaktifkan posisinya sebagai kepala daerah.



Mendagri Tito Karnavian

Hal itu dikatakan Mendagri sesuai memimpin Apel peringatan Hari Otonomi Daerah (Otodas) di Balaikota Surabaya pada Kamis (25/4/2024) pagi tadi seperti dilansir rri.co

Tito mengatakan dalam aturan yang ada, jika kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka

Liputan Sidoarjo.com

kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka maka yang bersangkutan akan dinonaktifkan.

"Kan ada aturan nya. Aturannya itu kalau semua kepala daerah yang ditetapkan tersangka, otomatis akan dinonaktifkan dan yang menggantikan biasanya wakilnya," kata Tito.

Ditanya terkait Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor yang saat ini masih aktif meski berstatus tersangka, Tito mengaku hanya mengetahui aturan sesuai prosedur dan tidak menyinggung materi kasus yang menjerat Ahmad Muhdlor.

"Saya bicara prosedur. Kalau hanya sebagai saksi tidak bisa dinonaktifkan, kalau sudah tersangka bisa dinonaktifkan dan jika menjadi terpidana itu sudah diberhentikan permanen," ungkapnya.

Diberikan sebelumnya, Kuasa hukum Bupati Sidoarjo Mustofa Abidin menyatakan bakal lakukan praperadilan usai Ahmad Muhdlor ditetapkan sebagai tersangka KPK dalam kasus pemotongan insentif ASN di badan pelayanan pajak daerah (BPPD).

Dijadwalkan, sidang pra peradilan akan digelar di PN Jakarta Selatan pada pekan depan.

(Abidin)

Liputan Sidoarjo.com



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Komisi B DPRD Sidoarjo Desak Pemkab Segera Tangani Carut-Marut Pengelolaan Pasar Tradisional

Admin

Thursday, April 25, 2024, April 25, 2024 WIB





Kabid Pasar menyampaikan pendapatnya di forum hearing Komisi B DPRD Sidoarjo

DNN, SIDOARJO – Jika mengacu pada APBD 2023 lalu, pendapatan Pemkab Sidoarjo dari pengelolaan 19 unit Pasar Tradisional di kota delta jauh lebih besar daripada nilai alokasi anggaran belanja untuk perawatan fasilitas umum tersebut.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

“Lebih besar koq. Saya carikan dulu data riilnya. Tapi masalahnya besaran nilai pendapatan dari pasar tidak signifikan dengan pembiayaan yang dikeluarkan secara rutin,” jelas anggota Komisi B DPRD Sidoarjo, Agil Effendi.

Pernyataan itu disampaikan di forum hearing atau Rapat Dengar Pendapat yang membahas tentang carut-marutnya tata kelola Pasar Tradisional di kota delta yang digelar Komisi B DPRD Sidoarjo, awal April lalu.



(dari kiri) Agil Effendi dan Arief Bactiar.
Lebih lanjut Agil mengatakan, dalam mengatasi masalah pengelolaan pasar tersebut, faktor terpenting adalah peran politik anggaran yang disusun bersama oleh Pemkab dan Badan Anggaran DPRD Sidoarjo.

“Untuk mengatasi masalah ini jawabannya adalah adanya komitmen bersama dari seluruh unsur yang ada, baik dari legislatif, eksekutif maupun pihak-pihak lain yang berkaitan dengan bidang ini untuk menata pasar tradisional menjadi lebih baik,” tandas legislator yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Demokrat-Nasdem tersebut.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sebelumnya Ketua Lembaga Pedagang Pasar (LPP) Sidoarjo, Nur Hasan Zakaria yang hadir bersama beberapa orang pengurusnya di forum tersebut mengungkapkan berbagai fakta di lapangan. Diantaranya kondisi bangunan pasar dan fasilitas pendukungnya yang sudah rusak dan penataan PKL yang menggelar dagangannya di bagian depan pasar sehingga merugikan pedagang lainnya.

“Bukan cuma itu. Ini contoh saja, untuk sekelas Pasar Sukodono yang berstatus SNI (Standar Nasional Indonesia-red) saja, kondisinya masih sangat kotor. Sudah begitu masih banyak pedagang yang mengeluh sering kemalingan disana,” ucapnya tegas.



Secara rinci, para pengurus LPP Sidoarjo persoalan-persoalan yang ada di setiap pasar. Diantaranya masalah penataan PKL liar yang masih terjadi sampai hari ini di hampir semua pasar. Khusus untuk Porong, pedagang juga mengeluhkan masalah penataan parkir yang ditangani PT Indonesia Sarana Service (ISS), rekanan Pemkab Sidoarjo di pengelolaan parkir tepi jalan umum dan lokasi khusus.

“PT ISS hanya mau mungut uang parkirnya saja tapi nggak mau ngatur, jadinya malah bikin macet. Selain itu sekarang ini Terminal Porong juga berubah jadi pasar,” keluh salah seorang perwakilan pedagang dari Pasar Porong.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pun demikian pula dengan kondisi Pasar Tulangan yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan PT PT. Wahyu Graha Persada sejak lima tahun yang lalu. “Sudah banyak rusak. Ya kamar mandi, lantai paving, atap juga bocor,” ujar Widodo, salah satu perwakilan pedagang di pasar itu.



Saat masalah itu dikomunikasikannya, pihak PT menyatakan masalah tersebut sudah menjadi kewenangan Pemkab Sidoarjo yang telah memungut retribusi. Sedangkan pihak Pemkab melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bersikukuh perawatan bangunan pasar Tulangan masih menjadi tanggung jawab perusahaan rekanannya tersebut.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujianto

Mendengar keluhan itu, Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujianto mendesak Disperindag untuk segera merespon keluhan para pedagang tersebut. "Antara hak dan kewajiban harus seimbang. Pedagang jangan disuruh mbayar terus, tapi masalahnya tidak ditangani," ucap politisi senior Partai Gerindra itu.

Untuk itu ia akan mengagendakan sidak ke beberapa pasar tradisional di kota delta untuk melihat secara langsung kondisi riilnya. Dengan begitu komisi yang membidangi ekonomi dan keuangan daerah tersebut bisa menginventarisir permasalahan di tiap-tiap unit.



“Dari situ kami dan pihak eksekutif akan bisa menyusun rencana program kerja untuk membenahi pasar-pasar tradisional tersebut. Termasuk gambaran besaran kebutuhan anggarannya yang perlu dialokasikan dalam APBD perubahan di pertengahan tahun nanti atau di APBD 2025,” sebut legislator asal Kecamatan Candi itu.

Sementara itu Sekretaris Komisi B DPRD Sidoarjo, Arief Bachtiar mengatakan pengelolaan pasar tradisional tetap harus dilakukan secara profesional. Dengan begitu akan menciptakan rasa nyaman bagi pedagang dan juga pembeli.

Beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk menciptakan kondisi tersebut diantaranya kebersihan lingkungan pasar, mulai dari bagian luar hingga di dalam. Juga tersedianya lahan parkir yang layak, rapi dan juga aman.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Unsur lain yang tetap harus dijaga adalah masalah keamanan bagi semua pihak yang berada di dalam pasar. “Aman disini maksudnya terjaga dari segala bentuk tindak kejahatan, maupun keselamatan jiwa dari berbagai potensi bahaya seperti kebakaran dan sebagainya,” imbuh politisi Golkar tersebut.

Terkait rekomendasi tersebut, Kepala Bidang Pasar Desperindag Sidoarjo, Sulton Hasan menyatakan kesiapannya. “Akan kami bicarakan dulu teknisnya secara internal. Soalnya kami tak bisa benahi sekaligus. Masalahnya terlalu kompleks. Jadi akan kami lakukan pemetaan dulu, selanjutnya mana yang bisa dikerjakan sesuai skala prioritasnya,” janjinya.(pram/sein)



Komisi B DPRD Sidoarjo Tanggapi Soal Kinerja Bupati Sidoarjo, Masih Perlu Evaluasi dan Pembinaan

24 April 2024 13:03 WIB

oleh redaksi



Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujiyanto



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

SIDOARJO, PETISI.CO – Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Bambang Pujiyanto, S.Sos, M.Si memberikan tanggapannya soal kinerja Bupati H Ahmad Muhdlor Ali, S.IP atau Gus Muhdlor.

H Bambang Pujiyanto mengatakan, meskipun belum sepenuhnya, namun ia menilai selama menjabat, Gus Muhdlor telah berhasil melakukan berbagai program sesuai dengan ketetapan yang dikeluarkan.

“Selama ini pembangunan yang dilakukan Gus Muhdlor berjalan meski belum sepenuhnya 100 persen,” ucapnya, Selasa (23/4/2024).



Namun, Bambang menyebutkan masih harus ada evaluasi dan pembinaan secara konsisten terhadap masyarakat dalam program yang dilaksanakan Gus Muhdlor.

“Masih harus ada evaluasi juga pembinaan, contohnya seperti program Kurma, yang tidak di awal saja masyarakat menikmatinya namun secara berkesinambungan, banyak keluhan-keluhan soal ini yang sampai kepada kami,” terangnya.

Lebih lanjut ia menegaskan Gus Muhdlor harus menepati janji-janjinya kepada masyarakat sebelum berakhir masa jabatannya.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Saat disinggung mengenai ditetapkanya Gus Muhdlor sebagai tersangka pemotongan insentif pajak, Bambang merespons hal itu merupakan wilayah koridor penegak hukum.

“Perihal itu merupakan bagian dari pihak berwenang penegak hukum, namun kami akan selalu menghormati proses yang ada,” ungkapnya.

“Perihal itu merupakan bagian dari pihak berwenang penegak hukum, namun kami akan selalu menghormati proses yang ada,” ungkapnya.

Bambang berharap baik pihak eksekutif, legislatif serta masyarakat saat ini dan kedepannya tetap dalam



kondisi aman dengan pembangunan segala aspek yang tetap berjalan demi memajukan Sidoarjo.

Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H Usman, M.Kes turut mengungkapkan berbagai keberhasilan masa kepemimpinan Gus Muhdlor.

“Kalau bupati saya pikir sudah kita lihat bersama, keberhasilan-keberhasilannya di bidang infrastruktur, bagaimana fly over Aloha, Krian, Tarik disamping itu jalan-jalan semua Kabupaten semua sudah di betonisasi, itu prestasi luas biasa, belum lagi masalah penataan kota, Alun-alun sudah dipercantik, Gor dan lain sebagainya,” ucapnya.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Ia melanjutkan Gus Muhdlor juga sebagai penggerak ekonomi masyarakat Sidoarjo.

“Itu riil bisa dilihat oleh masyarakat, di samping itu bagaimana bupati dalam mengerakkan ekonomi masyarakat dengan mendukung program-program UMKM dari sisi anggaran dan sebagainya,” terangnya.

Ia menegaskan hal itu semua merupakan prestasi dan pencapaian Gus Muhdlor yang harus diapresiasi oleh masyarakat Sidoarjo.

“Jadi kalau berbicara soal prestasi Bupati Sidoarjo sudah tidak diragukan lagi dan masyarakat menerima keberhasilannya,” pungkasnya. *(guh)*



Abdillah Nasih Pimpin Desk Pilkada PKB Sidoarjo, Pendaftaran Gratis

Iswin Arrizal Kamis, 25 April 2024 | 21:54 WIB



(Foto : Win)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

SIDOARJO - Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (**Pilkada**) di tahun 2024 ini. DPC Partai Kebangkitan Bangsa (**PKB**) Sidoarjo mulai melakukan penjaringan pendaftaran bakal calon bupati (bacabup) dan bakal wakil bupati (bacawabup) Sidoarjo mulai Minggu (28/4/2024) hingga 11 Mei 2024 secara offline.

Ketua Desk Pilkada PKB Sidoarjo, **Abdillah Nasih** mengatakan meskipun baru dibuka pada Minggu nanti, namun sejak Kamis ini formulir sudah bisa diambil.



“Monggo bagi warga masyarakat, sudah bisa mengambil formulir di kantor DPC PKB sejak hari ini. Sedangkan Minggu nanti, secara resmi pendaftaran dibuka dan pendaftar bisa menyerahkan formulir pendaftarannya,” tutur Abdillah Nasih saat konferensi pers, Kamis 25 April 2024.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pendaftaran secara offline atau datang langsung ke kantor DPC PKB Sidoarjo. Selain membuka pendaftaran secara Offline, PKB juga membuka pendaftaran secara online melalui web sicakada.pkb.id.



Setelah proses pendaftaran usai nanti, tahapan selanjutnya adalah verifikasi berkas pada tanggal 12 Mei hingga 15 Mei 2024. Disambung pada tanggal 16 Mei hingga – 30 Mei 2024 pelaksanaan UKK calon di DPP PKB Jakarta.

“Setelah UKK ini, maka biasanya calon calon yang lulus UKK, akan diberikan surat penugasan untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Kita DPC PKB Sidoarjo juga akan menyiapkan jadwal bagi seluruh calon untuk sosialisasi di 18 PAC se Kabupaten Sidoarjo,” tambah Sekretaris DPC PKB Sidoarjo Abdillah Nasih yang juga.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sementara itu pada kesempatan ini, Desk Pilkada PKB Sidoarjo menyatakan proses pendaftaran sebagai Cakada ini tidak dikenakan biaya sepeserpun alias gratis.

Penjaringan bacabup dan bacawabup partai besutan Muhaimin Iskandar tersebut tidak dibatasi untuk kader PKB saja. Akan tetapi, juga dibuka untuk masyarakat umum ataupun kader partai lain. "Asalkan mau mengikuti mekanisme yang ada di PKB," ucapnya.



Tidak ada syarat khusus yang harus dipenuhi cabup dan cawabup yang ingin maju dalam kontestasi bupati dan wakil bupati Sidoarjo. Syarat-syaratnya disesuaikan dengan Undang-Undang 6/2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. "Tidak ada mahar, semuanya gratis," tegasnya.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Abdillah Nasih mengungkapkan, internalnya hanya melakukan penjangkangan dan memeriksa kelengkapan administrasi dari para pendaftar.

Sedangkan hasilnya diajukan kepada dewan pengurus pusat (DPP) PKB melalui dewan pengurus wilayah (DPW) untuk dilakukan uji kelayakan. "Jadi siapa yang akan mendapat rekomendasi PKB, itu ditentukan oleh DPP," katanya.



Pria yang juga Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo itu mengungkapkan, PKB mendapat 15 kursi DPRD Sidoarjo pada Pemilu 2024. Itu artinya, PKB bisa mengusung kandidat cabup dan cawabup secara tunggal, tanpa koalisi dengan partai lain. Namun, dalam Pilkada PKB bisa mengusung cabup dan cawabup bergandengan dengan partai lain lewat koalisi.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Dengan begitu, elite partai berlambang bumi tersebut terus melakukan penjajakan dan komunikasi dengan berbagai pihak."Komunikasi politik tidak hanya dilakukan oleh DPC saja, tapi juga DPW dan DPP. Sebab, pilkada tidak hanya menjadi kepentingan politikus lokal,"



Dengan begitu, elite partai berlambang bumi tersebut terus melakukan penjajakan dan komunikasi dengan berbagai pihak."Komunikasi politik tidak hanya dilakukan oleh DPC saja, tapi juga DPW dan DPP. Sebab, pilkada tidak hanya menjadi kepentingan politikus lokal," katanya.

Bahkan untuk yang offline ini, sudah ada dua nama yang mendaftarkan diri. "Yang sudah mendaftarkan diri melalui jalur online adalah M.Sofi untuk posisi Cabup, dan M.Nurul Anwar untuk Cawabup," kata **Syihabuddin** sekretaris Desk Pilkada PKB

yang turut mendampingi press release.

